

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 2 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

LAYANAN KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) PERSPEKTIF MASLAHAH

Navida Azizah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : naviida14@gmail.com

Abstrak

Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan “*Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu*” namun data yang penulis peroleh di Desa Tanjunggunung Jombang dari 788 warga miskin hanya 517 yang mendapatkan KIS, sedangkan masih ada 284 warga miskin tidak mendapatkan KIS. Tentu hal ini memperlihatkan bahwa pembagian PBI KIS di Desa Tanjunggunung tidak berkesinambungan antara *das sollen* dan *das sein*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelayanan Pembagian KIS di masyarakat Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Jombang yang ditinjau melalui perspektif masalah, untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan di Desa Tanjunggunung Jombang. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, data sekunder diperoleh dari tinjauan literatur. Temuan yang dihasilkan adalah bahwa layanan KIS di desa Tanjunggunung Jombang telah sesuai dengan pespektif masalah karena memiliki manfaat dan kegiatannya bersifat rasional. Serta evaluasi pelaksanaan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 di Desa Tanjunggunung telah dilakukan dengan optimal.

Kata Kunci: Pemerintah; Kartu Indonesia Sehat ; Masalah.

Pendahuluan

Pemerintah merupakan perwakilan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat¹. Dalam hal ini, salah satu kebutuhan masyarakat yakni jaminan sosial atas kehidupan mereka.² Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan layanan terkait jaminan sosial yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada aturan ini, terdapat dua hal yang akan dijamin oleh pemerintah, yaitu kesehatan dan ketenagakerjaan. Kaitannya dengan aturan ini, peneliti perlu untuk mengkaji lebih dalam pada salah satu jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada

¹ Solechan. *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik*. Administrative Law & Governance Journal. Vol. 2, No. 4. 2019.

² Lamadang, Saharudin Is., dkk. *Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Kabupaten Buol*. JKMM, Vol 1, No. 3: 342-351. 2018.

masyarakat. Karena masalah kesehatan kini telah menjadi masalah yang besar bagi pemerintah Indonesia (Kemenkes, 2019). Jaminan sosial terkait kesehatan sudah tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang, Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sehingga sudah sangat jelas bahwa asas tersebut merupakan upaya untuk mengurangi dampak buruk dari masalah kesehatan, seperti kematian, kecacatan, dan lain sebagainya.

Asas-asas kesehatan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) harus diselenggarakan dengan optimal dan tidak mengambil keuntungan atas hak masyarakat (komersial) karena sifatnya sosial dan nirlaba. Tindak lanjut dari aturan ini yakni adanya pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mencoba untuk menciptakan formula Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS). KIS adalah kartu yang diperuntukan bagi masyarakat fakir dan miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis, kartu KIS merupakan program pemerintahan Joko Widodo untuk mengurangi masalah kesehatan di Indonesia. Program ini telah disahkan pada Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Jika ditinjau dari perspektif masalah, program KIS dapat menjadi permasalahan apabila memiliki dampak buruk bagi penerimanya. Pengertian masalah secara umum memiliki arti mendatangkan kebaikan, sedangkan menurut istilah adalah salah satu metode analisa yang dipakai oleh para ulama dalam menetapkan hukum (istinbat) terhadap suatu persoalan yang tidak diatur secara tertulis dalam Al Qur'an.³ Keterkaitan perspektif masalah dengan program KIS yakni apabila dalam implementasinya memberikan dampak baik, maka dapat dikatakan masalah. Jika dampaknya buruk atau memberi kemudharatan maka itu tidak dapat dikatakan masalah. Tinjauan dari beberapa penelitian terdahulu terkait layanan KIS, masyarakat banyak yang kecewa dan merasa puas terhadap program KIS ini

Penelitian terdahulu (Literature Review)

1. Danawita Sianturi, Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul *Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Pada Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kecamatan Dolok*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang membahas tentang Implementasi program KIS pada pelayanan kesehatan di puskesmas kecamatan Dolok. Adapun hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwasanya implementasi program KIS pada pelayanan kesehatan di puskesmas kecamatan Dolok secara umum sudah berjalan dengan baik hanya saja masih ada ditemukan beberapa kendala yang menghambat proses implementasi tersebut. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Danawita dengan penelitian penulis, yaitu fokus penelitian antara kedua penelitian ini berbeda. Dimana penelitian Danawita Sianturi lebih berfokus pada masalah pelayanan kesehatan program KIS di puskesmas kecamatan Dolok, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada pemerataan pembagian KIS bagi warga miskin di Desa Tanjunggunung kabupaten Jombang.⁴
2. Afritri Kurniawan, Universitas Bengkulu dengan judul *Pelayanan Pemegang Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Perawatan Kembang Seri kecamatan Talang Empat*

³ Hadi, Abdul, & Peristiwo, Hadi. *Konsep Al Masalah Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0*. Al Ahkam, Vol. 15, No. 2. 2019.

⁴ Sianturi, Danawita. *Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Pada Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Kecamatan Dolok*. Skripsi Universitas UtaraMedan. 2018.

kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang membahas bagaimana pelayanan pemegang KIS di puskesmas perawatan Kembang Seri kecamatan Talang Empat kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun penelitian ini mengemukakan bahwasanya masih banyak perbedaan dalam memberikan pelayanan terhadap pasien pengguna KIS dengan pasien yang bukan pengguna KIS. Sehingga terjadi kecemburuan social di masyarakat Kembang Seri. Hal ini adalah sesuatu yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Afritri Kurniawan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Arfitra dalam penelitiannya berfokus pada pelayanan yang didapat oleh pasien yang berobat menggunakan KIS. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemerataan pembagian KIS bagi warga desa Tanjunggunung kabupaten Jombang.⁵

3. Deny Kurniawan, Universitas Hasanudin dengan judul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pemanfaatan JKN di wilayah kerja puskesmas Tamalanrea Jaya kota Makassar. Adapun penelitian ini mengungkapkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi JKN di puskesmas Tamalanrea Jaya kota Makassar yaitu : Tingkat Pendidikan, tingkat pengetahuan, tingkat pekerjaan, tingkat pendapatan. Hal ini yang membedakan antara penelitian yang dilakukan Deny Kurniawan dengan penelitian penulis. Deny Kurniawan dengan penelitiannya berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pemanfaatan JKN di wilayah kerja puskesmas Tamalanrea Jaya kota Makassar, Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemerataan pembagian KIS bagi warga desa Tanjunggunung kabupaten Jombang dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Masalah.⁶
4. Kartika Dhita Eka Rizky, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Implementasi JKN oleh BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Kelurahan Wonosobo Timur, Kabupaten Wonosobo)*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang membahas bagaimana faktor yang mempengaruhi implementasi program JKN oleh BPJS Kesehatan bagi pelayanan kesehatan masyarakat miskin di kelurahan Wonosobo Timur, kecamatan Wonosobo, kabupaten Wonosobo. Adapun penelitian ini mengungkapkan faktor yang mempengaruhi implementasi JKN oleh BPJS Kesehatan bagi masyarakat kelurahan Wonosobo Timur meliputi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hal ini yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Kartika Dhita Eka Rizky dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dhita Eka Rizky berfokus pada faktor faktor yang mempengaruhi implementasi JKN oleh BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin di kelurahan Wonosobo Timur, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pemerataan pembagian

⁵ Kurniawan, Afritri. *Pelayanan Pemegang Kartu Indonesia Sehat di Puskesmas Perawatan Kembang Sari, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah*. Skripsi Universitas Bengkulu. 2017.

⁶ Kurniawan, Denni. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kerja Puskesmas Tamalanrea Jaya Kota Makassar*. Skripsi Universitas Hassanuddin. 2017

KIS bagi warga desa Tanjunggunung kabupaten Jombang dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Masalah.⁷

5. Monica Pratiwi, Universitas Diponegoro dengan judul *Efektivitas Program BPJS Kesehatan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pasien Pengguna jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srandol)*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang membahas Efektivitas Program BPJS Kesehatan di kota Semarang dengan mencari faktor-faktor yang menghambat dalam efektivitas program BPJS Kesehatan di Kota Semarang. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam efektivitas program BPJS Kesehatan di kota Semarang yakni sosialisasi program, pemahaman program, ketepatan sasaran, tujuan program tidak di ketahui oleh sebagian besar masyarakat kota Semarang belum berjalan dengan baik sehingga program BPJS Kesehatan belum berjalan dengan baik. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis mengingat penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada pemerataan pembagian KIS bagi warga desa Tanjunggunung kabupaten Jombang dengan menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Masalah.⁸

Berdasarkan paparan di atas dengan beragamnya hasil penelitian yang ditimbulkan terhadap pelayanan KIS. Oleh karena itu peneliti hendak menganalisis pelayanan KIS dengan menggunakan perspektif masalah pada wilayah dan waktu yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan dan terkini. Selain itu Penelitian ini dilakukan atas dasar, bahwa masalah kesehatan merupakan masalah yang kompleks yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Tidak hanya pada kota besar saja, melainkan wilayah sempit seukuran desa pun perlu dikaji lebih dalam, seperti pada salah satu wilayah di Kabupaten Jombang yakni Desa Tanjunggunung. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas jumlah masyarakat miskin penerima KIS sangat banyak di wilayah tersebut. Peneliti hendak melihat reaksi masyarakat terhadap layanan KIS jika ditinjau dengan perspektif masalah.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti menggunakan data primer dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui tinjauan literatur yang mendukung, arsip, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Lokasi yang menjadi tempat penelitian terletak di Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Pemilihan desa ini dilatar belakangi oleh pembagian KIS yang tidak merata bagi seluruh warga miskin tidak mampu yang ada di desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Narasumber yang akan diwawancara pun dipilih dengan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria, antara lain: informan mempunyai akses layanan KIS, mengetahui dan memahami tentang layanan KIS, baik teknis maupun fungsi, serta pernah menggunakan layanan KIS untuk melakukan pengobatan, terapi atau layanan kesehatan lainnya.

⁷ Eka Rizky, Kartika Dhita. *Implementasi JKN oleh BPJS Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Kelurahan Wonosobo Timur, Kabupaten Wonosobo)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2018

⁸ Pratiwi, Monica. *Efektivitas Program BPJS Kesehatan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pasien Pengguna jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srandol)*. Skripsi Universitas Diponegoro, 2017.

Hasil dan Pembahasan

Layanan Kartu Indonesia Sehat

Dinas Sosial Kabupaten Jombang berperan penting dalam menghimpun dan pengelolaan data terpadu masyarakat Jombang. Berdasarkan kinerja Dinas terkait, diperoleh data penerima KIS di Desa Tanjunggunung sebanyak 504 dari total penduduk sebanyak 6275 orang. Pendataan itu bermula dari tingkatan terendah yakni RT dan RW, pemerintah di tingkatan RT maupun RW dapat merekomendasikan warganya untuk mendapatkan KIS. Data yang sudah terhimpun akan dimusyawarahkan untuk menentukan siapa saja yang dianjurkan untuk mengikuti program ini. Kumpulan data akan diteruskan pada pemerintah di kecamatan, selanjutnya dapat diberikan kepada Dinas Sosial untuk diteruskan kepada gubernur dan instansi lainnya terkait pemberian layanan KIS. Data yang terhimpun pada Dinas Sosial itu bersifat final dan tidak dapat diubah kembali, sehingga pemerintah desa harus selalu memperbaharui data agar sesuai dengan fakta di lapangan atau relevan. Layanan KIS atau Kartu Indonesia Sehat merupakan layanan kesehatan yang diperuntukan untuk masyarakat fakir dan miskin guna meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak dapat digunakan pada seluruh rumah sakit di Indonesia. Melainkan hanya dapat digunakan pada rumah sakit, dan layanan kesehatan yang telah bermitra dengan pemerintah, umumnya rumah sakit negeri dan puskesmas.

Berdasarkan penelitian pada beberapa narasumber yang telah diwawancarai, peneliti menemukan bahwa sebagian narasumber merasa tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah melalui KIS. Seperti dikatakan oleh bapak Basyorianto Kepala Desa Tanjunggunung mengemukakan Keluhan pertama, berhubungan teknis yakni masyarakat tidak diberikan waktu yang jelas dalam menunggu penerbitan KIS. Ini sejalan dengan penelitian Sianturi (2018):⁹ Lama waktu menunggu yang pun bervariasi, ada dua tahun dan ada pula beberapa minggu saja. Hal ini terjadi karena pendataan pada Dinas Sosial tidak terekap dengan baik dan banyak pula data yang tidak relevan. Banyak data yang masuk tetapi Dinas Sosial memprioritaskan data yang terkini atau terbaru karena dianggap lebih sesuai karena masa pendataannya masih baru. Sedangkan data yang sudah terkumpul lama akan dikerjakan setelah data-data baru diolah. Sedangkan data yang tidak relevan, seperti nomor NIK yang diajukan oleh calon penerima tidak sama dengan nomor NIK yang ada di KK, kesalahan nomor KTP, dan lain sebagainya. Hal ini senada dengan yang di sampaikan Supadi, kesalahan pada NIK pun dialami pada penelitian Rukmini., dkk (2017)¹⁰ ini dapat menjadi penghambat mencapai kepuasan layanan KIS. Dampaknya yakni pengolahan dan pensortiran data tidak berjalan sesuai waktu yang ditetapkan. Keluhan lainnya dari narasumber lainnya, seperti yang dikatakan oleh Maisaroh yakni fasilitas KIS memberikan layanan yang tidak memuaskan, karena tidak semua biaya kesehatan di rumah sakit dibiayai oleh KIS. Penanganan UGD di salah satu rumah sakit yang bermitra dengan KIS pun tidak memberikan pembiayaan gratis kepada narasumber. Narasumber harus membayar meskipun hanya pemeriksaan ringan. Jika rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan KIS yang baik, maka pengobatan umumnya dilakukan di puskesmas. Namun, pelayanannya tidak sebaik rumah sakit. Hal ini membuat narasumber kecewa kepada program KIS ini.

⁹ Sianturi, Danarwita. *Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Pada Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Kecamatan Dolok*. Skripsi Universitas UtaraMedan. 2018.

¹⁰ Rukmini, R., Ristrini, R., & Tumaji, T. *Integrasi Jamkesda dalam JKN bagi PBI di Kota Blitar dan Kota Malang*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 20(1), 34-42. 2017.

Terdapat pula beberapa narasumber lain yang merasa puas terhadap layanan KIS yang diberikan pemerintah, pendapat ini disampaikan oleh Kolilah dan Rustan Efendi, mereka merasa tidak kesulitan dalam mengakses layanan KIS, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Ini sejalan dengan penelitian Arranury (2018):¹¹ Bahkan proses administrasinya pun memuaskan dan dilayani dengan baik oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Program KIS menurutnya sudah merata mutu layanannya di faskes utama ataupun di rumah sakit yang bermitra. Mereka merasa nyaman karena dilayani dengan baik, ramah dan tidak bertele-tele dalam memberikan sosialisasi kesehatan. Mereka mendukung program KIS untuk terus dikembangkan ke arah yang lebih maju lagi.

Kartu Indonesia Sehat di Tinjau dari Perspektif Masalah

Hukum Islam dibuat tidak lain karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. KIS didalam agama islam sendiri tidak ada doktrin jelas yang menentang program tersebut. maka dari itu peneliti menganalisis adanya program KIS tersebut dengan Perspektif Masalah. Masalah menurut pandangan Imam Syatibi adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika dihubungkan dengan program KIS, KIS seharusnya tidak bertentangan dengan syara dan rasional, maka hal itu dianggap sebagai perbuatan yang baik atau masalah.

Penjelasan Imam Syatibi terkait Masalah telah mengemukakan pendapat bahwa masalah merupakan pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam nash syar'i tidak ditemukan sesuatu yang mengandung masalah maka pendapat tersebut harus ditolak.¹²

Menyambung dari penjelasan pengertian Masalah oleh Imam Syatibi di atas, peneliti menganalisis mengenai adanya Program KIS yang dibuat pemerintah untuk warga masyarakat Indonesia khususnya warga di Desa Tanjunggunung, dapat diartikan sebagai KIS merupakan salah satu bentuk program menyejahterakan warga di bidang kesehatan yang dibuat oleh pemerintah untuk warga miskin. Secara umum dapat dilihat dari fungsi KIS, tujuan KIS, sasaran KIS dan objek KIS sudah menjelaskan secara gamblang bahwa KIS merupakan program yang dirancang khusus untuk warga miskin dalam bidang kesehatan. Hal ini diperuntukkan oleh seluruh warga miskin yang ada di Indonesia untuk menjadi jaminan hidupnya pada bidang kesehatan, di dalamnya mengcover kebutuhan warga masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Maka, dalam hal ini tidak ada permasalahan yang menunjukkan bahwa adanya Program KIS yang digalakkan oleh Pemerintah merugikan warga atau dalam kata lain yakni tidak memasalahkan umat.

Berdasarkan temuan yang dihasilkan dari penelitian ini, pemerintah Desa Tanjunggunung sudah memiliki niat baik guna memberikan kemaslahatan masyarakatnya melalui pendataan masyarakat penerima KIS.¹³ Hal ini menunjukkan

¹¹ Arranury, Zilfadhilah., dkk. *Kualitas Pelayanan Kesehatan Pasien Peserta JKN-KIS Di Bagian Rawat Jalan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Perspektif Pelanggan Internal Dan Eksternal*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim, Vol. 1, No.3. 2018.

¹² Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer," *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, 291.

¹³ Wawancara bapak Basyorianto Kepala Desa Tanjunggunung, 25 Februari 2021 jam 13.25 di Rumah Bapak Kepala Desa Tanjunggunung.

bahwa KIS telah mengandung manfaat dan kebaikan di dalamnya terhadap kehidupan masyarakat desa Tanjunggunung, Kabupaten Jombang. Dalam pelaksanaan program KIS tidak adanya larangan dari nash dan ijma', namun Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga berisi hal yang baik dan rasional sehingga boleh untuk dilakukan. Meskipun dalam pelaksanaannya program KIS masih terdapat permasalahan, seperti data yang tidak terekap dengan baik akibat tidak sesuainya data di lapangan, salah nama, dan lain sebagainya. Tetapi program KIS sudah mendapatkan hasil yang cukup baik dengan bukti wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang mendukung adanya program KIS ini. Sehingga program ini tidak dapat dikatakan program gagal, melainkan layanan dari program ini belum merata antara satu faskes dan faskes lainnya. Hal ini pun juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, sehingga mereka terlalu skeptis terhadap program KIS. Namun dibalik terlaksananya program ini, tetap selalu ada tenaga medis yang melayani dengan sungguh.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa program KIS yang diselenggarakan pemerintah kepada masyarakat fakir dan miskin sudah cukup baik, walaupun belum merata dan optimal secara keseluruhan, tetapi pemerintah akan selalu mengembangkan program ini dari waktu ke waktu. Sehingga program ini boleh dilakukan untuk menciptakan kebaikan yang lebih. Walaupun tidak ada aturan dan ijma' yang melarang, namun program KIS tetap boleh dilakukan. Program KIS ini pun sudah sesuai dengan perspektif masalah yang memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat luas, serta programnya merupakan kegiatan yang masuk akal untuk dilakukan. Saran kedepannya bagi penelitian selanjutnya adalah hendaknya meneliti efektifitas program KIS di tengah pandemi COVID 19, sebab COVID 19 merupakan masalah kompleks yang sedang dihadapi berbagai negara saat ini. Di Indonesia program KIS dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan angka penyebaran COVID 19.

Daftar pustaka

- Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masalah." *Salam: Sosial Jurnal dan Budaya Syar-i*. Vol. 1. No. 2. 2014.
- Asmawi. "*Teori Al-Maslahah dan Aplikasinya dalam Norma Kriminalisasi Undang-Undang Antikorupsi.*" *Ahkam*. Vol. XIII. No. 02. 2013.
- Astomo, Putra. "Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan : Good Governance Principles in Running Governance." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. XVI. No. 64. 2014.
- Haetami, Enden. "Perkembangan Teori Masalah 'Izzu Al-Din bin 'Abd Al-Salam dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam." *Asy-Syar'iyah*. Vol. 17. No. 1. 2015.
- Hamid, Abdul. "Aplikasi Teori Masalah (Maslahat) Najm Al-Din Al-Thufi dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis di Bank Syariah." *Al-'Adalah*. Vol. XII. No. 4. 2015.
- Hasanah, Idaul. "Konsep Masalah Najamuddin AL-Thufi dan Implementasinya." *Hasanah*. Vol. 7. No. 1. 2011.
- Hendri Hermawan Adinugraha & Mashudi. "Al-Maslahah AL-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 4. No. 01. 2018.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Masalah dalam Konsumsi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 1. No. 1. 2015.

- Kharisma, Bayu. "Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta: Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan." *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol. 19. No. 1. 2014.
- Laily, Elida Imro'atin Nur. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif." *Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 3. No. 2. 2015.
- Maryam, Neneng Siti. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol. VI. No. 1. 2016.
- Muis, Muhammad Amirul Haq dkk. "Analisis Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 8. No. 2. 2014.
- Nazsir, Nasrullah. "Good Governance." *Mediator*. Vol. 4. No. 1. 2003.
- Rosyadi, Imam. "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah." *Profetika*. Vol. 14. No. 1. 2013. .
- Safitri, Sani. "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia." *Jurnal Criksetra*. Vol. 5. No. 9. 2016.
- Setyono, Joko. "Good Governance dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)." *Jurnal Muqtasid*. Vol. 6. No. 1. 2015.
- Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Pranata Hukum*. Vol. 6. No. 2. 2011.
- Tahir,Dr. "Kebijakan Publik dan Transparansi." *Jurnal Administrasi Publik : Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Vol 6. No. 5. 2008
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Formulasi Teori Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer." *Istinbath*. Vol. 12. No. 1. 2013.
- Arannury, Zilfadhilah., Dkk. *Kualitas Pelayanan Kesehatan Pasien Peserta JKN-KIS Di Bagian Rawat Jalan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Perspektif Pelanggan Internal Dan Eksternal*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Maritim*, Vol. 1, No.3. 2018.
- Erna., dkk. *Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin*. *Cendikia Jaya*, Vol. 2, No. 2. 2020.
- Lamadang, Saharudin Is., dkk. *Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Kabupaten Buol*. *JKMM*, Vol 1, No. 3: 342-351. 2018.
- Rismawan, Rifki., dkk. *Kebijakan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pemerintah Kota Palu Di Era Jaminan Kesehatan Nasional*. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI)*, Vol. 7, No. 4. 2018.
- Rukmini, R., Ristrini, R., & Tumaji, T. *Integrasi Jamkesda dalam JKN bagi PBI di Kota Blitar dan Kota Malang*. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 20(1), 34-42. 2017.
- Simbolon, Naomi Rahmawati Br. *Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat*. *STRUKTURASI*, Vol. 1, No. 1. 2019.
- Solechan. *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik*. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2, No. 4. 2019.
- Widyasari, Sang Ayu Nyoman Puspa. *Implementasi Program Mobile JKN Dalam Memberikan Pelayanan Pengguna KIS Di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Karangasem*. *Citizen Charter*, Vol. 1, No. 1. 2019.

- Wijaya, Trisnadi, & Fajriana, Icha. *Tingkat Kepuasan Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan di Kota Palembang*. EKSIS, Vol. 32, No. 2. 2018.
- Hadi, Abdul, & Peristiwa, Hadi. *Konsep Al Maslahah Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0*. Al Ahkam, Vol. 15, No. 2. 2019.